BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Zakat

1. Pengertian zakat

Secara bahasa (etimologi) zakat berasal dari Bahasa Arab yaitu *zaka* memiliki arti bersih, bertambah, tumbuh atau berkembang, berkat, dan pujian.¹ Secara terminologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.² Sedangkan pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³

Zakat dalam arti bersih dimaksudkan zakat dapat membersihkan diri dari kekikiran, atau hal-hal yang dianggap kotor dengan zakat maka kita kembali suci. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Kementrian Agama, 2011). 33.

² Em Zul Fajri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Difa Publisher Bahasa, 2008). 607.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* (Q.S at-Taubah: 103)

Sedangkan dalam arti bertambah, tumbuh dan berkembang dimaksudkan karena zakat ini diwajibkan maka dengan melaksanakan dan mengeluarkan sejumlah harta maka diyakini bahwa Allah akan mengganti dengan berlipat ganda harta yang sudah dikeluarkan untuk zakat tersebut. zakat dalam arti berkah dan pujian dimaksudkan zakat dapat mendatangkan hal baik kepada harta kita yang lain. Hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

فَأَرْزُقْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا

Artinya: *“Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya)”* (Q.S al-Kahfi: 81)

2. Dasar Hukum zakat

a. Menurut hukum positif Indonesia

Zakat dianggap memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat luas Indonesia tidak hanya untuk masyarakat yang memeluk agama Islam tetapi juga bisa mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Pemerintah berusaha agar zakat ini bisa menjadi salah satu kegiatan pemerintah dibidang ekonomi dan sosial sehingga zakat tidak lagi dipandang menjadi masalah intern umat Islam, maka dari itu sejak masa reformasi landasan aktifitas zakat di Indonesia sudah mulai dibahas mengenai aturan pengelolaan zakat.

Dasar hukum zakat di Indonesia pada awalnya adalah Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut membuat pertumbuhan zakat di Indonesia sangat signifikan ditandai dengan semakin banyaknya organisasi yang mulai mengelola zakat hal ini yang belum diantisipasi oleh pemerintah menyebabkan penyaluran zakat kurang efektif.

Maka untuk memaksimalkan pengelolaan zakat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang statusnya mencabut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Kemudian untuk pelaksanaannya terbit Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk lebih memperjelas mengenai pedoman pengelolaan zakat.¹ Serta untuk memastikan transparansi pengelolaan zakat BAZNAS mengeluarkan Peraturan BAZNAS nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

b. Menurut hukum Islam

Zakat termasuk dalam Rukun Islam yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Hal tersebut karena harta atau apapun yang kita miliki didunia ini hanyalah titipan. Sehingga kita harus menggunakan sebaik mungkin sesuai dengan ajaran Islam dan sebisa mungkin berguna untuk masyarakat sekitar. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011). 29.

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Q.S al-Dzariyat:19)

Sehingga dengan kita mengingat bahwa semua hanya titipan maka hal tersebut menghindarkan kita dari sifat sombong dan kikir. Selain itu mengeluarkan zakat dengan ikhlas dan semata-mata hanya untuk Allah, maka kita juga akan bisa mendapatkan ridha Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an sebagai berikut:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Artinya: “Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati dimana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup” (Q.S Maryam: 31)

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Artinya: “Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.” (Q.S Maryam: 55)

Zakat merupakan salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa iman tidak bisa diprediksi dan selalu berubah di setiap saat. Maka untuk tetap menjaga iman kita agar tidak hilang dan berkurang secara drastis maka zakat adalah salah satu caranya, karena dengan mengeluarkan zakat kita akan mengingat Allah

dan hari akhir maka akan semakin menambah iman kita.² Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

هُدًى وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Artinya: “Untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untum orang-orang yang beriman (yaitu) orang-orang yang mendirikan dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat” (Q.S an-Naml: 2-3)

Mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada *mustahiq* juga tidak sembarangan, sebisa mungkin kita mengeluarkan zakat dengan kualitas terbaik atau paling tidak setara dengan apa yang kita makan atau yang selayaknya. Zakat juga tidak boleh diambilkan dari hasil barang haram atau hasil pencurian. Karena pada hakikatnya zakat itu membersihnya dan mengembalikan kita atau harta kita kembali suci sesuai fitrahnya maka sebisa mungkin diambilkan dari harta kita sendiri.³

Mengeluarkan zakat bukanlah hanya menggugurkan kewajiban karena zakat termasuk rukun Islam dan wajib dilaksanakan, tetapi manfaat zakat juga akan kembali ke diri kita masing-masing. Sehingga kita harus memberikan hal yang terbaik tanpa pamrih agar bisa mendapatkan manfaatnya, seperti mendapatkan ridha dan rahmat Allah.

² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf.*, 33.

³ Huda Hendra, *Zakat Di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset: 2010). 42.

3. Syarat zakat

a. Syarat harta kekayaan yang wajib terkena zakat

- 1) Kepemilikan yang penuh
- 2) Berkembang
- 3) Melebihi kebutuhan pokok
- 4) Bebas dari hutang
- 5) Mencapai nisab
- 6) Berlaku satu tahun

b. Syarat orang yang mengeluarkan zakat

Orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut *muzaki*, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa *muzaki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Untuk menjadi *muzaki* seseorang harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- 1) Mukmin/muslim
- 2) Baligh dan berakal
- 3) Merdeka
- 4) Memiliki harta yang mencapai nisab.⁴

⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia.*, 34.

c. Syarat orang yang menerima zakat

Orang yang berhak menerima zakat disebut *mustahik*, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa *mustahik* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Hanya 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat atau biasa di sebut dengan 8 (delapan) asnaf. Hal tersebut karena tidak semua berhak menerima zakat, 8 (delapan) golongan tersebut sudah di delaskan di al-Qur'an sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (Q.S al-Taubat: 60)

Sehingga dengan berpedoman ayat tersebut maka golongan *mustahik* yang berhak menerima zakat antara lain sebagai berikut:

- 1) Fakir, yang masuk dalam golongan fakir adalah orang yang amat sangat sengsara hidupnya yang tidak mempunyai harta serta tenaga dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- 2) Miskin, yang masuk dalam golongan miskin adalah orang yang dalam kehidupannya dalam keadaan kekurangan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.
- 3) Amil/pengurus, seseorang yang bertugas sebagai pengelola zakat seperti pengumpulan dan mendistribusikan zakat.
- 4) *Mu'allaf*, yang termasuk dalam golongan *mu'allaf* adalah orang yang imannya belum kuat karena baru masuk Islam.
- 5) *Riqab*, yang termasuk dalam golongan *riqab* adalah budak (hamba) yang tidak memiliki kemerdekaan untuk dirinya sendiri.
- 6) *Gharim*, yang termasuk dalam golongan *gharim* adalah orang yang memiliki hutang dan tidak bisa lunasi hutang tersebut tetapi bukan karena maksiat.
- 7) *Fisabilillah*, yang termasuk dalam golongan *fisabilillah* adalah orang yang berjalan di jalan Allah atau orang yang mengerjakan sesuatu yang disukai Allah demi mendapat ridha Allah.
- 8) *Ibnu sabil*, atau yang biasa di sebut juga dengan *musafir* yang termasuk dalam golongan *ibnu sabil* adalah orang yang sedang melakukan perjalanan (bukan perjalanan maksiat) dan ditengah perjalanan kehabisan bekal dalam perjalanannya tersebut.⁵

⁵ Sri Nurhayati, *Zakat Modern* (Bandung: Pustaka Setia, 2015)., 95.

4. Jenis-jenis zakat

Islam membagi zakat menjadi dua macam antara lain: zakat fitrah (zakat untuk jiwa) dan zakat mal (zakat untuk harta). Perbedaannya terletak pada fokus dan waktu pelaksanaannya dengan penjelasan sebagai berikut:

a. zakat fitrah

zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslim, kecil ataupun dewasa, laki-laki ataupun perempuan, budak ataupun merdeka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat fitrah berupa makanan pokok sehari-hari seperti beras jagung dan sebagainya. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat badan atau jiwa. Fokus zakat ini mengacu pada individu/perorangan.

b. Zakat mal

Mal memiliki arti segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sehingga zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang telah mencapai jumlah minimal tertentu dan telah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.

5. Harta yang di kenai zakat

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, harta yang dikenai zakat antara lain:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya,
- b. uang dan surat berharga lainnya,
- c. perniagaan,
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan,

- e. peternakan dan perikanan,
 - f. pertambangan,
 - g. perindustrian,
 - h. pendapatan dan jasa.
6. Hikmah zakat
- a. Menumbuhkan jiwa sosial
 - b. Mengangkat derajat fakir dan miskin
 - c. Membina tali persaudaraan
 - d. Menghilangkan sifat kikir dan sombong
 - e. Menghilangkan jurang antara yang kaya dan yang miskin
 - f. Sarana pemerataan pendapat
 - g. Mendidik manusia untuk saling berbagi
 - h. Menumbuhkan rasa syukur nikmat.

B. Pengelolaan Zakat Di Indonesia

1. Ugens lembaga pengelolaan.

Zakat selain berdampak kepada diri sendiri juga bisa berdampak kepada kemaslahatan masyarakat. Dengan potensi zakat di Indonesia yang begitu besar maka hal tersebut harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien dari mulai hal penghimpunan dan pengelolaan zakat sampai dengan disalurkan zakat kepada mustahik. Agar potensi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka perlu dibentuk lembaga yang bergerak khusus untuk pengelolaan zakat serta dibantu masyarakat sekitar, hal tersebut didasarkan kepada ayat al-Qur'an sebagai berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S at-Taubah: 103)

Ayat menjelaskan bahwa zakat bisa diambil dari *muzaki* dan disalurkan kepada *mustahik*, hal tersebut merupakan tugas dari amil zakat yaitu menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan zakat. Untuk kepastian hukum dan akuntabilitas zakat dibentuklah lembaga khusus yang memiliki legalitas dan bertanggung jawab kepada pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menegaskan bahwa hanya lembaga yang memiliki izin pemerintah yang boleh melaksanakan penarikan zakat hal tersebut untuk meminimalisir adanya lembaga-lembaga yang ilegal. Hal tersebut dilakukan agar lembaga pengelola zakat bisa bermanfaat untuk masyarakat antara lain sebagai berikut:

- a. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
- b. Untuk mencapai efisien dan efektivitas pengelolaan zakat
- c. Dapat pemeratakan pendistribusian zakat.
- d. Memperlihatkan semangat menerapkan nilai-nilai Islam.⁶

⁶ Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial* (Jakarta: Kencana, 2006)., 40.

Dilihat dari manfaat yang bisa didapat jika zakat dikelola oleh lembaga yang khusus maka oleh pemerintah masyarakat disarankan untuk mengalihkan zakat yang dahulu biasanya mendistribusikan zakat sendiri langsung kepada mustahik diganti menjadi mengamanahkan zakat kepada amil zakat untuk dikelola agar zakat menjadi lebih efektif.

2. Badan Amil Zakat nasional

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS lembaga pengelola zakat nasional yang resmi dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 serta Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 membuat BAZNAS memiliki wewenang untuk mengelola zakat secara nasional.

Tugas dan fungsi BAZNAS menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yaitu merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengelolaan zakat serta dapat bekerjasama dengan pihak lain serta menyusun pedoman pengelolaan zakat yang nantinya menjadi acuan pengelola zakat. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan hak amil. BAZNAS dapat mendirikan perwakilannya disetiap wilayah provinsi/kota/kabupaten. Serta untuk melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS dapat membentuk UPZ disetiap instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, kecamatan atau desa.⁷

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

BAZNAS memegang nilai-nilai luhur dan Islami antara lain: visioner, optimis, jujur, sabar, amanah, keteladanan, professional, perbaikan berkelanjutan, *entrepreneurial*, dan transformasional yang harus selalu dipegang teguh dan harus tercerminkan disetiap melaksanakan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini jaringan BAZNAS sudah tersebar luas diberbagai wilayah dengan total antara lain: 34 BAZNAS provinsi, 463 BAZNAS kabupaten/kota, dan 23 lembaga zakat internasional. Selain itu BAZNAS juga telah meraih beberapa penghargaan antara lain: *Top Eksekutif Muslim* 2019, *Scholarship Awards* 2019, *IMZ Award* 2012, *Indonesia Community Engagement Award* 2018, *Indonesia Fundraising Award* 2020, *UKAS Management System* 2018, serta banyak penghargaan lainnya.⁸

3. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah salah satu lembaga yang dibentuk masyarakat serta memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS. LAZ merupakan lembaga swasta masyarakat yang didirikan menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 serta Surat Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

⁸ Badan Amil Zakat Nasional, "Profil BAZNAS Indonesia" *Layanan Muzaki* (Online), (<https://www.baznas.go.id/profil> Diakses Pada 1 Januari 2021)

Sebagai transparansi pengelolaannya LAZ wajib melaporkan pengelolaan kepada BAZNAS dan pemerintah terkait. Untuk mempermudah tugas dan fungsinya LAZ dapat membentuk perwakilannya disetiap wilayah provinsi/kota/kabupaten tetapi LAZ hanya bisa membuka 1 perwakilan disetiap kota/kabupaten. Pembentukan perwakilan LAZ wajib mendapat izin dari menteri serta memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga yang berbadan hukum.
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- c. Memiliki pengawas syariah
- d. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- e. Bersifat nirlaba
- f. Memiliki program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat
- g. Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.⁹

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 mengatur pembentukan perwakilan LAZ semakin diperketat. Pendirian perwakilan LAZ diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 Pengelolaan Zakat, untuk pedoman pengelolaan zakat di LAZ berpedoman pada peraturan BAZNAS dan ketentuan pengurus LAZ pusat.

⁹ Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

4. Pelaporan pengelolaan Lembaga Amil Zakat di Indonesia

Potensi zakat di Indonesia sangat besar sehingga pemerintah sangat berharap pada tahap penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah dilaksanakan dengan maksimal serta menciptakan pengelolaan yang melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaannya. Agar masyarakat lebih percaya terhadap lembaga pengelolaan zakat yang dampaknya bisa meningkatkan jumlah muzaki, serta bisa menyerap dana zakat secara maksimal. Maka dari itu pemerintah membuat aturan mengenai pelaporan pengelolaan zakat yang sistematis dan terarah untuk menghindari kecurigaan dan ketidakpercayaan umat, serta penyimpangan-penyimpangan.¹⁰

Aturan tersebut terdapat pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa “LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala” kemudian diatur lebih terperinci di pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang menyatakan bahwa “LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala”.

¹⁰ Muhammad Abubakar, *Managemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2015),. 71.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 hanya menyebutkan bahwa LAZ wajib melaporkan pengelolaannya kepada BAZNAS setempat secara berkala hal tersebut diatur lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 73 yang menyatakan bahwa laporan wajib disampaikan setiap 6 bulan dan akhir tahun. Hal tersebut diperinci lagi Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat pada Pasal 3 menjelaskan tentang rentang waktu untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat,¹¹ sedangkan Pasal 4 ayat (4) menjelaskan mengenai jenis laporan yang harus dilaporkan untuk laporan 6 bulan,¹² dalam Pasal 5 ayat 8 menjelaskan bahwa pengumpulan laporan 6 bulan paling akhir pada 15 Juli. Sedangkan Pasal 6 ayat (4) menjelaskan mengenai jenis laporan yang harus dilaporkan untuk laporan akhir tahun.¹³ Dalam Pasal 8 (8) menjelaskan bahwa pengumpulan laporan akhir tahun terakhir pada 31 Januari. Sedangkan dalam pasal 2 Peraturan BAZNAS nomor 4 tahun 2018 menyebutkan bahwa format pelaporan pengelolaan zakat sesuai pada bagian lampiran Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 tahun 2018. Laporan kinerja di susun dengan sistematika berikut:

¹¹ Pasal 73 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 4 Tahun 2018: 1) Laporan 6 bulan pengelolaan zakat dimulai 1 Januari sampai 30 Juni tahun berjalan. 2) Laporan akhir tahun pengelolaan zakat dimulai 1 Januari dengan 31 Desember tahun berjalan

¹² Pasal 4 Ayat (4): Laporan 6 bulan pengelolaan Zakat meliputi: a. Laporan keuangan; dan b. Laporan kinerja.

¹³ Pasal 6 ayat (4): Laporan akhir tahun pengelolaan zakat meliputi: a. laporan keuangan yang telah diaudit; dan b. laporan kinerja.

Tabel

Sistematika Laporan Kinerja Badan/Lembaga Pengelola Zakat

<p>BAB I</p> <p>Pendahuluan</p> <p>Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi</p>
<p>BAB II</p> <p>Perencanaan Kinerja dan Realisasi Tahun Berjalan</p> <p>Mengacu ke Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditambahkan kolom realisasi dan perbandingan dengan target/anggaran.</p>
<p>BAB III</p> <p>Perbandingan Realisasi dengan tahun sebelumnya</p> <p>Mengacu kepada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya</p>
<p>Bab IV</p> <p>Penutup</p> <p>Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya</p>
<p>Keterangan: *) Sekurang-kurangnya memuat informasi sebagaimana yang disajikan dalam format Laporan Kinerja 6 (enam) Bulanan.</p>

5. Audit pelaporan pengelolaan

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang terintegrasi dan akuntabilitas agar dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi diperlukan audit dalam pelaporan pengelolaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia audit adalah pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara berkala, Keharusan audit LAZ di sebutkan pada awal pendirian LAZ dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa “LAZ hanya diberikan izin apabila memenuhi persyaratan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala”.¹⁴

Pemerintah mengantisipasi apabila ada LAZ yang tidak mampu melakukan audit maka dipermudah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa LAZ bisa melaporkan keuangan yang belum diaudit tetapi disertai dengan surat keterangan ketidakmampuan melaksanakan audit.¹⁵ Sedangkan dalam Pasal 75 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2011 menjelaskan mengenai pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan audit syariah dan audit keuangan dengan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁶ Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dana ZIS dan dana lainnya.

¹⁴ pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁵ pasal 7: Dalam hal pengelola zakat tidak dapat menyampaikan laporan akhir tahun yang telah diaudit oleh kantor akuntan, pengelola zakat dapat menyampaikan laporan keuangan yang belum diaudit dengan melampirkan surat keterangan ketidakmampuan untuk dilakukan audit.

¹⁶ Pasal 75 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014: 1) Audit syariah dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, 2) Audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.

Selain itu Kementerian Agama RI juga mengeluarkan KMA Nomor 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat. Dalam pedoman tersebut Kementerian Agama melakukan audit syariah secara komprehensif, transparan, dan akurat. Ruang lingkupnya mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Setelah dilaksanakan audit syariah wajib melaporkan hasil audit kepada direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam. Tujuan dari audit syariah adalah untuk menjaga agar pengelolaan zakat tetap patuh kepada syariat Islam, mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah.¹⁷

Sedangkan untuk audit keuangan dilakukan oleh pihak eksternal atau kantor Akuntan Public (KAP) yang telah memiliki izin secara resmi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia berupaya memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi yang baik dari suatu lembaga. Pada tahun 2011, IAI menerbitkan pedoman standart akuntansi keuangan (PSAK) 109 pedoman tersebut sebagai standarisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dikelola oleh organisasi pengelola zakat. Pedoman tersebut untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah.¹⁸

¹⁷ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat

¹⁸ Pernyataan standart akuntansi keuangan (PSAK) 109 tentang Akutansi Zakat dan Infaq/Sedekah

6. Pembinaan dan pengawasan

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat agar BAZNAS dan LAZ bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pihak-pihak yang berhak melakukan tugas membina dan mengawasi sebagai berikut antara lain:

- a. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ. Menteri yang dimaksud adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama yang dalam hal ini menteri agama setempat.
- b. Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

Menteri, gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dilakukan dengan meliputi penyedia layanan fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi yang diperlukan oleh BAZNAS dan LAZ setempat. Dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga.¹⁹

Masyarakat juga dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Masyarakat bisa melakukan pembinaan dalam rangka sebagai berikut:

¹⁹ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; serta
- 2) Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

Selain pembinaan tersebut masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ yang bisa dilakukan dalam bentuk, antara lain:

- 1) Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
- 2) Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.²⁰

7. Sanksi administratif

Dalam mengantisipasi pelanggaran yang terjadi dan untuk meminta pertanggung jawaban terhadap pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah maka pemerintah sudah menentukan sanksi yang dijelaskan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan mengenai jenis-jenis sanksi administratif, yaitu:

- a. peringatan tertulis,
- b. penghentian sementara dari kegiatan
- c. pencabutan izin

Kemudian sanksi administratif tersebut diatur lebih lanjut didalam bab X Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 menjelaskan mengenai mekanisme pemberian sanksi sebagai berikut Dalam pasal Pasal 77 menjelaskan BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:

²⁰ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- a. Tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzzaki
- b. Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana sosial lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan perntukan yang diikrarkan oleh pembentuk.
- c. Tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial lainnya.

Kemudian dalam Pasal 79 menyebutkan bahwa LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melakukan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dijelaskan lebih rinci dalam pasal 9 peraturan BAZNAS Nomor 4 tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelola zakat yang tidak menyampaikan laporan 6 bulan dan akhir tahun akan dikenakan sanksi administratif.²¹

Dalam 81 Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 menjelaskan bahwa:

- a. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada BAZNAS dan LAZ yang melanggar ketentuan pasal 77 Pemerintah Nomor 14 tahun 2014
- b. Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara,
- c. Sanksi administratif akan dicabut apabila kewajiban BAZNAS dan LAZ sudah dipenuhi
- d. Dalam hal LAZ melakukan pengulangan dan pernah mendapat sanksi penghentian sementara maka akan dikenakan sanksi administratif pencabutan izin operasional.

²¹ peraturan BAZNAS Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

- e. Dalam hal BAZNAS melakukan pengulangan dan pernah mendapat sanksi penghentian sementara maka anggota atau pimpinan yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan diberhentikan.

Dalam pasal 82 menjelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat memberikan sanksi administratif, yaitu:

- a. Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan BAZNAS diberikan oleh menteri
- b. Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan BAZNAS provinsi/kota dan LAZ diberikan oleh BAZNAS
- c. Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh menteri.²²

Dengan adanya sanksi tersebut yang sudah dijelaskan secara terperinci mekanismenya diharapkan pengelola baik BAZNAS ataupun LAZ bisa melakukan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan menjamin transparansi pengelolaan zakat terhadap pemerintah ataupun masyarakat luas. Sehingga pengelolaan zakat lebih sistematis dan terarah sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat.

²² Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.